

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis di zaman sekarang ini semakin ketat. Perusahaan yang bisa menaikkan laba secara berangsur-angsur dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Seperti contoh banyaknya perusahaan manufaktur di Indonesia yang bersaing dalam bisnisnya untuk menarik para investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan serta menaikkan nilai perusahaan di mata investor. Perusahaan manufaktur merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah atau bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Contoh perusahaan manufaktur seperti pada sektor industri dasar dan kimia yang melakukan pengolahan pada sub sektor semen, logam dan sejenisnya, pakan ternak, keramik, porselen dan kaca, kimia, dan sebagainya.

Perusahaan juga harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik agar para kepentingan dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tujuan serta dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* adalah sebuah rangkaian proses, kebijakan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Pengelolaan *corporate governance* yang baik atau *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dan juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk

mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

Menurut Zahra, *et al.* (2016) *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Menurut Muchtar dan Darari (2012-2013) *corporate governance* berkaitan erat dengan cara-cara dimana semua pihak tertarik pada kesejahteraan organisasi dengan upaya untuk memastikan bahwa pimpinan dan orang yang berkepentingan lainnya mengambil tindakan untuk melindungi para pemangku kepentingan. Dalam tata kelola perusahaan, untuk meningkatkan kinerja dan mendapatkan keuntungan terdapat beberapa pihak yang berperan penting seperti dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, yang memiliki tugas masing-masing. Dalam upaya meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan perusahaan, untuk menjalankan tugasnya masing-masing diperlukan adanya pemberian kompensasi.

Kompensasi merupakan imbalan berupa gaji, tunjangan, atau bonus yang diterima oleh para pekerja atas jasa atau hasil kerja yang telah dilakukan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Syoraya dan Januarti (2014) kompensasi merupakan pemberian pembayaran finansial kepada dewan sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dan juga untuk memotivasi kinerja di waktu yang akan datang. Dalam *annual report* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kompensasi diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.

Dewan komisaris merupakan anggota dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Menurut Dewi, *et al.* (2018) dewan komisaris merupakan orang yang utama menjalankan sistem tata kelola yang ada di dalam perusahaan serta mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Begitu pula direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Menurut Dewi, *et al.* (2018) dewan komisaris berguna untuk mengontrol suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mewakili semua mekanisme internal sehingga secara luas mempunyai peran penting dalam *corporate governance* khususnya dalam mengawasi manajemen tingkat atas atau dewan direksi. Khairani dan Harahap (2017) berpendapat bahwa kompensasi atau remunerasi dewan merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada individu sebagai pertimbangan hadiah bisa dalam bentuk gaji, upah, bonus, insentif, atau manfaat lainnya. Seperti PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017 dewan komisaris menerima kompensasi sebesar Rp 5,6 miliar yang berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 4,8 miliar.

Lalu PT SLJ Global Tbk yang memberikan kompensasi kepada dewan komisaris sebesar Rp 1,6 miliar pada tahun 2017.

Semakin meningkatnya kinerja dewan komisaris terhadap perusahaan maka akan semakin meningkatkan laba perusahaan sehingga kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi pun bisa meningkat serta bisa menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan tolak ukur yang dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan kepada anggota dewan. Selain itu, kompensasi bisa membuat motivasi kerja kepada anggota dewan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba.

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya seperti anggota dewan direksi atau pemegang saham. Menurut Asna (2017) komisaris independen diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan tanpa pengaruh dari berbagai pihak lainnya. Menurut Dewi, *et al*, (2018) komisaris independen mengambil peran yang cukup luas dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan sehingga sangat berdampak besar terhadap kebijakan dalam suatu pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh langsung kepada kebijakan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Asna (2017) keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.

Dengan keberadaan elemen yang dibutuhkan dalam rangka memastikan peranan tata kelola perusahaan yang baik maka perlu adanya susunan dalam melakukan kinerja perusahaan. Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Lalu, kinerja perusahaan merupakan hasil dari kinerja perusahaan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Putra (2015) kinerja perusahaan merupakan alat ukur keberhasilan manajer dalam menjalankan perusahaan. Menurut Muchtar dan Darari (2012-2013) kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi selama periode tertentu dengan mengacu pada standar yang sudah ditetapkan.

Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, selain itu dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri, serta *good*

corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerja (Darwis, 2009). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya dilihat dari *return on assets* (ROA) dan dilihat dari nilai pasar perusahaan (Tobin's Q).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khairani dan Harahap (2016) menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q. Hasil penelitian ini mendukung asumsi bahwa pemberian kompensasi kepada dewan komisaris atau direksi dapat meningkatkan kinerja anggota dewan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian menurut Muller (2014) kompensasi dewan komisaris berhubungan signifikan terhadap ROA. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi dewan yang diberikan kepada dewan komisaris maka akan menaikkan kinerja perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa komponen kompensasi ini memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja perusahaan. Namun, menurut penelitian Mun, *et al.* (2019) bahwa tidak ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja perusahaan, yang artinya berapapun kompensasi yang diberikan perusahaan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung, jadi besar kecilnya kompensasi yang diberikan perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Petchsakulwong dan Jansakul (2018) menemukan bahwa pengaruh komisaris independen terhadap ROA adalah positif tetapi tidak

signifikan secara statistik dengan ROA yang artinya bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut penelitian Zahra, *et al.* (2016) komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komisaris independen akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut penelitian Chou dan Buchdadi (2017) hubungan antara komisaris independen dan Tobin's Q adalah positif dan signifikan yang berarti komisaris independen mempengaruhi nilai pasar pada perusahaan.

Namun, menurut penelitian Rasyid (2018) koefisien regresi hubungan antara komisaris independen dan kinerja perusahaan ada hubungan negatif dan signifikan antara komisaris independen dan kinerja perusahaan yaitu Tobin's Q dan hubungan negatif tidak signifikan dengan ROA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak komisaris independen akan menurunkan kinerja perusahaan. Penelitian menurut Tertius dan Christiawan (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka ROA perusahaan akan turun (kemampuan perusahaan dalam profitabilitas rendah).

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai penambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang *corporate governance* di Indonesia.

2. Bagi investor dan calon investor penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam proses menjual atau membeli saham.
3. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.